

WALHI
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

AKADEMI **EKOLOGI**



Piagam Orang Muda Pulihkan Indonesia

Konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia

*Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
2023*

PIAGAM ORANG MUDA PULIHKAN INDONESIA

Kami, perwakilan orang muda Indonesia dari 38 provinsi telah berkumpul dalam Konferensi Nasional Orang Muda Pulihkan Indonesia pada tanggal 25 November di Jakarta. Konferensi ini merupakan wujud kesadaran terhadap peran penting orang muda dalam memperjuangkan pemulihan lingkungan dan sumber-sumber penghidupan rakyat. Kami menyadari pentingnya suara kami dalam menentukan arah masa depan pembangunan Indonesia yang berbasis Wilayah Kelola Rakyat (WKR), mengurangi bencana ekologis dan perjuangan menuju keadilan iklim.

Saat ini orang muda dibebani dengan tanggung jawab atas jargon pemerintah "Indonesia Emas 2045", namun para pemimpin hari ini justru menarik orang muda pada situasi bencana ekologis dan krisis iklim yang berdampak domino pada segala aspek kehidupan warga negara. Minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan kontestasi politik, orang muda dinilai hanya menjadi objek untuk meraup suara. Sekitar 55 persen pemilih dalam Pemilu 2024 adalah orang muda.

Kami menyaksikan dan mengalami bencana ekologis dan efek domino perubahan iklim dalam kehidupan sehari-hari. Perampasan lahan masyarakat adat, petani dan nelayan terus berlangsung, hutan dan gunung diubah menjadi wilayah tambang, lahan-lahan basah gambut dialihfungsi kebun-kebun sawit dan food estate, sementara wilayah pesisir direklamasi dan lautnya menjadi muara limbah industri dan sampah plastik. Di perkotaan, pencemaran udara dipicu pembakaran energi fosil dari kendaraan bermotor dan PLTU batubara. Kami percaya

pembangunan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), melestarikan deforestasi dan degradasi lahan serta pembakaran bahan bakar fosil adalah kontribusi utama Indonesia pada perubahan iklim.

Kami mengakui, bersama buruh, petani, masyarakat adat, perempuan dan kelompok disabilitas, bahwa orang muda juga kelompok rentan terhadap bencana ekologis dan dampak perubahan iklim. Kerentanan ini dapat ditunjukkan dengan orang muda yang terserang ISPA akibat dari pencemaran udara dari kebakaran lahan, hutan, gambut, ataupun polusi akibat pembakaran bahan-bakar energi fosil dan PLTU di kota-kota besar. Ini dikuatkan dengan pernyataan Kemenkes pada September 2023 bahwa persentase kasus ISPA non-pneumonia yakni 55 persen pada penduduk usia produktif (17-45), sedangkan untuk kasus ISPA pneumonia yakni 55 persen pada balita. Tak hanya rentan kesehatan fisik, orang muda juga rentan terhadap kesehatan mental karena berada pada perubahan fisik, emosional dan sosial, yang situasinya bisa diperparah oleh krisis iklim.

Mengingat kerentanan orang muda terhadap bencana ekologis dan dampak perubahan iklim, penting untuk ditekankan bahwa kesetaraan antar generasi merupakan aspek yang penting. Maka dari itu, penting untuk memperjuangkan keadilan generasi dalam upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Hal ini mencakup perlunya kebijakan yang mengakui ketidaksetaraan yang mungkin terjadi di antara generasi, serta melibatkan partisipasi aktif orang muda dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan dan perubahan iklim. Dengan demikian, dapat diciptakan solusi yang tidak hanya melibatkan dan melindungi generasi saat ini, tetapi juga meninggalkan warisan yang berkelanjutan bagi generasi-generasi yang akan datang.

Kami menilai bahwa mutu dan kualitas sumber daya manusia Indonesia sangat ditentukan oleh sistem pendidikan. Praktik pendidikan dalam satu dekade ini cenderung mengutamakan pendidikan formal dan meminggirkan pendidikan informal seperti pondok pesantren, sekolah adat dan sekolah alternatif di kolong jembatan dan di dalam rimba.

Anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN dan senilai 608 triliun pada tahun 2023 belum mampu menyentuh anak wajib sekolah untuk bisa sekolah. Jika dikelola secara benar dan tanpa korupsi, kami yakin semua anak-anak Indonesia bisa sekolah dan para pengajar terpenuhi kesejahteraannya. Pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang berkeadilan, berkualitas dan gratis untuk melahirkan orang yang cerdas dan berakhlak, serta pendidikan yang mampu menjawab permasalahan moral, sosial dan lingkungan hidup

Kami secara kolektif melihat dan merasakan kebijakan pemerintah hanya menguntungkan segelintir elit ekonomi politik (oligarki) hal ini dapat dilihat dari praktik kebijakan UU Penanaman Modal Asing, UU Cipta Kerja, UU Minerba sampai pada kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk Perda Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang melegitimasi pengerukan dan penguasaan sumberdaya alam secara eksploitasi menjadi sebab krisis iklim dan bencana ekologis yang dalam prakteknya meminggirkan hak-hak rakyat atas ruang hidup dan penghidupannya, oleh karena itu kami orang muda menuntut perlindungan dan pemenuhan hidup yang layak untuk semua generasi.

Kami melihat solusi-solusi palsu pemerintah dalam mengatasi krisis iklim dan bencana ekologis. Transisi energi salah satunya solusi palsu karena tidak berkeadilan dan selalu menguntungkan segelintir elit ekonomi politik. Dalam Paris Agreement 2015 lalu, pemerintah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% sampai 41% dan bisa dicapai pada 2030. Suatu kemustahilan akan berhasil jika solusi mengatasi krisis iklim dijawab dengan bisnis karbon. Keperluan rakyat saat ini, petani bisa panen, nelayan tidak perlu berlayar jauh untuk memperoleh ikan, perempuan dan anak di perkotaan bisa memperoleh udara dan air yang sehat. Bukan sebaliknya, malah menjadi korban bencana ekologis sebagai akumulasi dampak dan risiko atas meningkatnya krisis iklim. Kami, orang muda Indonesia tidak mau menjadi bagian dari solusi palsu pemerintah.

Seruan Orang Muda Indonesia

Konferensi orang muda Indonesia telah menghasilkan butir-butir kesepakatan yang kami sebut sebagai Piagam Orang Muda Pulihkan Indonesia. Piagam ini merupakan pernyataan komitmen kolektif kaum muda Indonesia untuk:

1. **Kami orang muda Indonesia** bersepakat membangun kekuatan kolektif mempertahankan tanah air Indonesia dan ikut memastikan tumbuhnya demokrasi dan terpenuhinya keadilan antar generasi.
2. **Kami orang muda Indonesia** akan memastikan negara menyediakan pendidikan yang berkualitas, bebas pembiayaan, mengakomodir pengetahuan lokal, perlindungan sekolah alternatif serta peningkatan kesejahteraan para pengajar.
3. **Kami orang muda Indonesia** akan selalu mengingatkan penyelenggara negara untuk melindungi segenap tumpah darah dan seluruh bangsa Indonesia dari ancaman risiko bencana ekologis dan krisis iklim sesuai amanat UUD 1945.
4. **Kami orang muda Indonesia** akan memastikan bahwa negara harus segera meninggalkan sistem ekonomi politik pro kapitalisme dan beralih pada ekonomi nusantara yang berorientasi pada konsep ekonomi kerakyatan yang berakar pada kemandirian dan kearifan lokal, perlindungan lingkungan dan sosial sebagai jalan untuk menjawab kemiskinan dan ketergantungan pada utang luar negeri
5. **Kami orang muda Indonesia** berkomitmen untuk mengawal dan memastikan bahwa pemerintahan yang terpilih pada PEMILU 2024 akan menjadikan piagam ini sebagai dasar utama dalam pembentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025, demi mencapai visi Indonesia Pulih 2045

Jakarta, 25 November 2023

Kepedulian Kami, Orang Muda Indonesia

Kami, orang muda Indonesia memiliki kepedulian terhadap persoalan bangsa dan telah memetakan 4 persoalan mendasar yang penting untuk menjadi perhatian para penyelenggara negara, mulai dari kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga di nasional.

Ada 4 permasalahan utama yang telah kami petakan dan menjadi prioritas bagi kami orang muda Indonesia untuk segera direspon, yaitu:

1. Bencana Ekologis dan Krisis Iklim
2. Perampasan Sumber Daya Alam dan Demokrasi
3. Ekonomi Kapitalis
4. Penyeragaman Pendidikan

Sebagai pemikiran orang muda Indonesia, kertas kerja ini harus menjadi perhatian dari para pengambil kebijakan dalam mengurus negara, serta mengajak orang muda Indonesia untuk segera berkonsolidasi dan menyerukan krisis yang sedang terjadi serta menjadi bagian dalam mengatasinya.

Bencana Ekologis dan Krisis Iklim

Permasalahan

- Deforestasi dan eksploitasi yang intensif secara langsung berkontribusi pada perubahan iklim dan bencana ekologis disebabkan oleh kapitalisme yang tidak terkendali, peningkatan suhu laut kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh perubahan iklim dapat mengancam wilayah pesisir dan komunitas rentan.
- UU Ibu Kota Nusantara (IKN) menciptakan peluang investasi asing yang besar dalam sektor-sektor seperti perkebunan dan pertambangan yang dapat meningkatkan deforestasi dan kerusakan lingkungan.
- Krisis iklim dan bencana ekologis bersumber dari modus ekonomi kapitalisme yang bercorak eksploitasi tidak berkelanjutan mengakumulasi keuntungan dan semua itu tercermin atau terekspos dari kebijakan atau regulasi negara yang tidak berorientasi pada keadilan. Kebijakan tersebut di antaranya UU Ibu Kota Negara, UU Cipta Kerja, UU Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Presiden No. 112 tahun 2022 yang mengakomodir kepentingan korporasi dan eksploitasi industri ekstraktif.

- Kebijakan pemerintah hanya menguntungkan oligarki dan pemerintah melalui kebijakan di atas sehingga melegitimasi eksploitasi sumber daya alam berlebih yang memperparah krisis iklim dan dalam prosesnya meminggirkan sebagian kelompok masyarakat dan melakukan perampasan lahan sehingga menimbulkan kemiskinan dan kehilangan ruang hidup.

Aktor Penyebab Permasalahan

- Kelompok oligarki (pemerintah, legislatif, eksekutif dan yudikatif, korporasi/pengusaha, dan politisi).
- Hubungan perusahaan dan konsumen yang berperilaku menggunakan produk-produk perusak lingkungan.
- Minimnya kesadaran masyarakat Indonesia.

Visi Orang Muda Indonesia

- Terwujudnya keadilan antar generasi.
- Hukum yang adil dan konkrit.
- Lingkungan yang sehat, aman, teduh, harmonis, dan sentosa untuk dapat bertahan hidup.
- Adanya kehidupan yang ramah lingkungan.

Resolusi Orang Muda Indonesia

- Menuntut penghidupan yang layak untuk semua generasi dan kelompok masyarakat secara luas.
- Terlibat melakukan advokasi litigasi dan non-litigasi, termasuk dalam mencabut UUCK.
- Memperbanyak aksi demonstrasi, aksi kampanye kreatif dan berbagai sosialisasi.
- Melakukan budaya hidup ramah lingkungan, menggunakan pangan berkelanjutan, mengurangi penggunaan kemasan yang dapat menambah penumpukan sampah.

- Mencegah dan mengurangi aktivitas industri untuk tidak berlebihan dan sesuai pada prosesnya.
- Memperkuat adat dan kearifan lokal.
- Bergabung dengan WALHI, melakukan peningkatan kesadaran masyarakat dan terlibat upaya transformasi sistem.

Perampasan SDA

Permasalahan

- Tempat pembuangan akhir ilegal tersebar pemukiman penduduk di Tangerang Selatan yang berdampak buruk bagi masyarakat sekitar.
- Privatisasi sumber daya air oleh perusahaan multinasional dan menjadikan air sebagai barang ekonomi serta mengubah aturan pengelolaan sumber daya agar air dapat dikuasai oleh perusahaan multinasional.
- Tambang pasir besi di Lumajang yang mengakibatkan terbunuhnya Salim Kancil. Di Kabupaten Lumajang terdapat banyak sumber pasir yang dihasilkan dari erupsi Gunung Semeru. Hal inilah yang mengakibatkan perampasan sumber daya alam secara ilegal. Perampasan ini berdampak secara sosial pada masyarakat dan sumber penghidupan mereka karena banyak lahan pertanian yang rusak.
- Eksploitasi tambang batu gajah merupakan perampasan tanah dan ruang hidup rakyat.
- Alih fungsi hutan yang dilakukan oleh perusahaan sawit.
- Pertambangan pasir laut yang menyebabkan hancurnya biota laut, berkurangnya tangkapan nelayan, dan konflik horizontal.
- Pengembangan kawasan industri di Pesisir Banten yang mempersempit kawasan tangkap nelayan di Banten.
- Perampasan ruang hidup Suaka Margasatwa Rawa Singkil Aceh (ekosistem gambut) oleh Perusahaan sawit yang merusak daerah aliran sungai, merusak habitat orang utan dan mempercepat deforestasi.
- Soal Wadas, proyek pertambangan batu gamping di wilayah perkebunan untuk bendungan dengan melibatkan masyarakat yang manipulatif.

- Peristiwa Kanjuruhan yang mendorong solidaritas di Tangerang Selatan oleh mahasiswa yang mendapat tekanan kekerasan dari negara.
- Penggusuran masyarakat Rempang yang dipastikan berakibat buruk pada generasi yang akan datang.
- Penggusuran wilayah Masyarakat Cawang Gumilir yang mengakibatkan masyarakat kehilangan tempat tinggal, bercerai berai dan tak ada lahan kelola masyarakat.
- Perampokan di wilayah Gunung Salak untuk kepentingan pembangunan pariwisata skala besar.
- Pengembangan industri Bantaeng, Sulawesi Selatan yang mencemari laut serta merusak kawasan pertanian masyarakat.
- Ekspansi Proyek Strategis Nasional: pembangunan PLTN di Bangka Belitung, penambangan nikel di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, Tenggara, dan Selatan, serta penambangan timah di Bangka Belitung.

Desakan kepada Negara

- Mencabut UU dan aturan turunannya mendorong perampasan.
- Mencabut UU dan aturan turunannya yang sarat akan nuansa privatisasi dan komersialisasi air.
- Menghentikan proyek swastanisasi sumber daya alam dan menuntut hak akses masyarakat atas air dengan mengambil alih pengelolaan air untuk dapat diakses oleh masyarakat.
- Mendesak pelibatan masyarakat dalam setiap proyek pembangunan.
- Mendesak pemerintah untuk merumuskan regulasi yang tidak mengutamakan sektor bisnis semata.
- Mendesak pemerintah untuk merumuskan UU yang berorientasi pada perlindungan ekosistem, HAM (hak-hak masyarakat), dan terutama hak generasi muda.

Resolusi Orang Muda Indonesia

- Melakukan penguatan kapasitas dan pengorganisasian rakyat yang lebih kuat melalui Pendidikan kritis.
- Memperkuat gerakan litigasi.
- Mengawal advokasi dan kampanye Integrasi tata ruang.
- Memperkuat kampanye bersama.
- Mengkonsolidasi akademisi.
- Membangun wadah progresif gerakan orang muda.

Ekonomi Kapitalis

Permasalahan

- Pembangunan ekonomi yang masih berorientasi kepada pasar, membuat masyarakat berada dalam kondisi yang sangat rentan.
- Perampasan lahan masyarakat oleh negara yang didasari pada ekonomi pasar, logika demikian akhirnya menciptakan ketimpangan dalam penguasaan sumber daya alam yang di dominasi oleh pemodal atau investor, sehingga membuat masyarakat terpinggirkan dari wilayah kelolanya.

Visi Orang Muda Indonesia

- Perlu ada upaya yang serius untuk mendorong masyarakat untuk membangun badan-badan usaha Wilayah Kelola Rakyat (WKR) yang berorientasi pada kedaulatan kebutuhan sosial masyarakat.
- WKR yang dipahami adalah pengelolaan sumber daya alam di tangan rakyat sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 45 yang mengatur tentang pengakuan, perlindungan dan jaminan atas sumber-sumber hidup dan penghidupan yang di peruntukan sebesar-besarnya untuk rakyat.
- WKR penting untuk terus dijalankan karena menggunakan konsep berkelanjutan berbasis kearifan lokal untuk menghilangkan ketergantungan rakyat terhadap pasar bebas yang saat ini terjadi. Karena kearifan lokal dalam tata kuasa itu juga dapat menjawab tantangan krisis perubahan iklim.

Resolusi Orang Muda Indonesia

- Pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat dan pengetahuan masyarakat, baik di komunitas lokal dan masyarakat adat.
- Mendorong disahkannya RUU Keadilan Iklim.
- Pengakuan terhadap produk WKR dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk lokal yang ramah lingkungan .

Penyeragaman Pendidikan

Permasalahan

- Metode Pendidikan mengulang-ulang dan dipaksa menyesuaikan, penyeragaman kurikulum dan metode, tidak berdasarkan peminatan, tidak membangun ruang kesadaran kritis.
- Pendidikan formal tidak menyentuh isu lingkungan, mengikuti logika pasar, dan kurang membangun kesadaran lingkungan.
- Liberalisasi pendidikan, komersialisasi pendidikan dan privatisasi pendidikan.
- Meninggalkan pengetahuan lokal masyarakat dan membawa pandangan baru dan pengetahuan baru yang ekstraktif.
- Individualistis dan sangat kompetitif yang di dominasi kecerdasan intelektual dan psikomotorik.
- Pelajar dianggap sebagai obyek Pendidikan sehingga usia dini tidak mengenali lingkungan bermain, sekolah dasar: tidak membangun rasa bertanggung jawab dan lulusan sekolah menengah atas: tidak siap mandiri. Pendidikan berorientasi pada ijazah semata.
- Menekan pelajar memahami semua pelajaran sehingga menjauhkan dari bakat pelajar. Pendidikan berbasis kewajiban bukan kesadaran dan belajar karena nilai bukan karena niat serta pola mengajar yang monoton.

Visi Orang Muda Indonesia

- Terwujudnya kesejahteraan pengajar.
- Perubahan kebijakan pendidikan dan pembaharuan kurikulum dengan prinsip:

keadilan ekologis berbasis pengetahuan lokal, keadilan antar generasi, dan demokratisasi pendidikan.

Resolusi Orang Muda Indonesia

- Internalisasi akademi ekologi di daerah.
- Mendorong adanya regulasi kebijakan pendidikan dari semua jalur, jenjang yang bervisi pada keadilan ekologis dan nilai kearifan lokal.
- Pengorganisasian masyarakat lokal dan membangun kolaborasi antar aktor dan lembaga.
- Kampanye pentingnya keadilan ekologis.

Bahan bacaan lanjut:

Wilayah kelola rakyat: <https://www.walhi.or.id/community-based-area-management-wkr>

Ekonomi Nusantara: <https://www.walhi.or.id/ekonomi-nusantara-tawaran-solusi-pulihkan-indonesia-updated>